

KINERJA DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI PEKANBARU

Harpemi Zahratul Hayaty

Email : Harpemizahra@gmail.com

Dibimbing oleh Drs. Zaili Rusli, M.Si

Email : Zailirusli@ymail.com

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widia Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

Background problem in this study is a nine -year compulsory education since 1994 has announced a target that lesson all children aged 7-15 years receive a basic education services. The main problem that often arises in the success of the implementation of the nine-year compulsory education is how to ensure that children who have graduated from elementary school to junior high continuing education, both regular SMP, SMP or through programs open B. Package of the children who experienced dropouts actually means to have enough free time that can be used for education if the means that can be used for education if the facilities and assistance available. This condition can not be separated from the role of the Department of Education to participate in Pekanbaru in facilitating the presence of children who drop - out or can not continue the school though only up to a basic level (primary and junior) , to provide education Packet A or other facility.

Keywords: Performance, nine-year compulsory education

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah sektor instansi publik, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mempunyai rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2012-2017 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Dengan demikian rencana yang disusun mengandung beberapa aspek yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis

dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi pendidikan dalam mengambil keputusan tentang masa depan pendidikan yang diharapkan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategis yang jelas dan tepat, maka diharapkan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dapat menyelaraskan potensi peluang,

dan kendala yang dihadapi. Rencana strategis bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan sebagai Instansi Pemerintah (LAKIP).

Di dalam peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan dan didalam ayat (3)

warga negara Indonesia yang berusia diatas 15 tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya pemerintah dan /pemerintah daerah. Dari undang-undang diatas sudah dijelaskan bahwa warga negara berhak mendapatkan atau memperoleh pendidikan yang dilindungi oleh undang-undang.

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan kehidupan bangsa. Demikian pentingnya peranan pendidikan tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Tabel 1.2
Data siswa tidak tamat sekolah pada jenjang SD

SEKOLAH DASAR											
No	KOTA	SD		JUMLAH	KELAS						KET
		L	P		I	II	III	IV	V	VI	
1	PEKANBARU	59	57	116	19	19	16	25	18	19	

Tabel 1.2 di atas menunjukkan jumlah siswa yang tidak tamat sekolah pada jenjang Sekolah Dasar, Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah siswa yang tidak tamat sekolah pada jenjang Sekolah Dasar berjumlah 116 siswa, perempuan berjumlah 57 orang dan

laki-laki berjumlah 59 orang, dimana pada kelas I berjumlah 19 orang, pada kelas II berjumlah 19 orang, pada kelas III berjumlah 16 orang, pada kelas IV berjumlah 25 orang, pada kelas V berjumlah 18 orang dan pada kelas VI berjumlah 19 orang.

Tabel 1.3
Data siswa tidak tamat sekolah pada jenjang SMP

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA								
NO	KOTA	SMP		JUMLAH	KELAS			KET
		L	P		I	II	III	
1	PEKANBARU	61	52	113	23	61	82	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Tabel 1.3 di atas menunjukkan jumlah siswa yang tidak tamat sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, bahwa siswa jenjang SMP yang tidak menyelesaikan sekolahnya berjumlah 113 siswa, perempuan berjumlah 52 orang dan laki-laki berjumlah 61 orang, dimana pada kelas I berjumlah 23 orang, pada kelas II berjumlah 61 orang, dan pada kelas III berjumlah 82 orang.

Pada kenyataan masih adanya anak di Pekanbaru usia sekolah yang belum dapat mengenyam pendidikan, diantaranya tidak mau atau enggan bersekolah, minimnya pengetahuan orang tua untuk menyekolahkan anak usia sekolah dinilai berkontribusi pada terhentinya keberlanjutan pendidikan anak-anak usia sekolah di kawasan tersebut sehingga keberlanjutan pendidikan anak-anak usia sekolah terpaksa terhenti dan tidak melanjutkan sekolah karena keinginan sendiri. Eksploitasi anak sebagai pekerja diperempatan lampu merah jalan utama di kota Pekanbaru mulai marak. Keberadaan anak jalanan yang masih usia sekolah ini, seperti terlihat di Perempatan lampu merah Soekarno Hatta dan lampu merah depan kantor Gubernur juga bisa memberikan pandangan dan penilaian negatif terhadap Pemerintah yang kurang memperhatikan masalah kemiskinan serta pendidikan. Pemerintah perlu mengusulkan Perda eksploitasi anak untuk mencegah orang tua atau masyarakat mempekerjakan anak usia sekolah. Sebab jika tak ada aturan yang jelas, fenomena eksploitasi anak ini akan terus berkembang dan menjamur.

Penyebab anak putus sekolah di Kota Pekanbaru lainnya yaitu berhubungan dengan faktor ekonomi orang tuanya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan

tahun 1997 tidak secara nyata berdampak pada angka partisipasi dan angka putus sekolah di tingkat pendidikan dasar seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Namun beberapa hasil kajian, seperti kajian oleh *Central Independent Monitoring Unit* (CIMU), Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menunjukkan bahwa krisis ekonomi berpengaruh nyata terhadap pendapatan sekolah. Krisis ekonomi menyebabkan sebagian besar penghasilan orang tua murid berkurang, sehingga berakibat langsung pada merosotnya kemampuan mereka dalam ikut mendukung biaya operasional sekolah (Hartono *et all* , 2003:456).

Ketersediaan sarana prasarana penunjang yang menjadi prasyarat terselenggaranya pendidikan yang baik juga masih terbatas dan bahkan cenderung memburuk. Hal ini antara lain dapat dilihat dari adanya ruang kelas yang rusak, baik milik pemerintah maupun swasta, layanan terhadap pendidikan dasar yang masih minim seperti jumlah perpustakaan serta buku-buku untuk siswa yang masih kurang, kadang-kadang siswa disuruh membeli buku paket yang dijual oleh pihak sekolah sedangkan disatu sisi pendapatan orangtua murid tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi hal tersebut. Kurangnya jumlah tenaga, rendahnya kualitas, dan tidak meratanya ketersebaran tenaga guru, masih merupakan permasalahan besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, tuntutan terhadap terjaminnya perbaikan kualitas pendidikan menjadi tantangan yang makin berat bagi penyelenggara pelayanan pendidikan saat ini.

Padahal dengan program Wajib Belajar 9 tahun yang didukung dana

APBD Kota Pekanbaru tahun 2012 berjumlah Rp. 382.432.699.930 dan tahun 2013 berjumlah Rp. 408.561.453.840 seharusnya tidak ditemukan lagi anak jalanan yang tidak mengenyam pendidikan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan masalah-masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Kinerja Dinas Pendidikan Pekanbaru dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Dinas Pendidikan Pekanbaru dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun ?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui Kinerja Dinas Pendidikan Pekanbaru dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Dinas Pendidikan Pekanbaru dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.
2. Manfaat Penelitian
Di dalam penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan.
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi pada umumnya dan khususnya pada Administrasi Negara.

- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang Kinerja Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Pekanbaru.

- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Pekanbaru.

- b. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Pekanbaru.

- c. Sebagai praktik dari teori penelitian dan juga sebagai praktik dalam pembuatan karya ilmiah dengan suatu metode penelitian ilmiah.

KONSEP TEORITIS

1. Konsep Kinerja Organisasi
Dwiyanto (1995:1) mengemukakan pejabat birokrasi seringkali menetapkan capaian target sebagai kinerja dari ukuran organisasi publik, sementara masyarakat pengguna jasa lebih suka menggunakan kualitas layanan sebagai ukuran kinerja, sehingga terdapat 5 indikator untuk menilai kinerja, yaitu :
 - a. Produktivitas
 - b. Kualitas Layanan
 - c. Responsivitas
 - d. Responsibilitas
 - e. Akuntabilitas

Kata kinerja merupakan terjemahan dari bahasa inggris performance. Oleh penulis dan peneliti terdahulu diartikan sebagai prestasi kerja dengan pengertian yang dikatakan dengan prestasi kerja adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan menonjol kearah

tercapainya tujuan organisasi Moekijat (1991:23)

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi/instansi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral maupun etika.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan prestasi kerja atau kemampuankerja dari suatu tim/individu atau dari suatu bagian pencapaian tujuan organisasi/instansi.

1. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan suatu struktur pembagian kerja dan struktur dan tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Menurut Pradjudi Armosudiro (2006:12) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang /sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.

Menurut Jati, (2000:11) organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama, organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama, organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu

untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Jati, (2000:17) unsur-unsur organisasi meliputi :

1. Manusia (Man).
2. Kerjasama.
3. Ujian Bersama.
4. Peralatan (Equipment).
5. Lingkungan.

Adapun ciri-ciri organisasi menurut Rahmadi, (2005:17) :

1. Adanya komponen (atasan dan bawahan)
2. Adanya kerjasama
3. Adanya tujuan
4. Adanya sasaran
5. Adanya keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati
6. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif ini bertujuan membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian Deskriptif ini tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dengan baik tentang wajib belajar 9 tahun.

Penelitian ini mengguankan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh secara langsung dari wawancara dengan informan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Pekanbaru.

PEMBAHASAN

A. Kinerja dinas Pendidikan dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kota Pekanbaru.

Kinerja dapat didefenisikan sebagai pencapaian hasil. Dengan demikian, kinerja adalah konsep utama organisasi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dilakukandalam rangka pencapaian tujuan. Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

Melalui penelitian ini Penulis ingin menganalisis atau melihat Kinerja Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Pekanbaru, penulis menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Produktivitas

Efektivitas dalam suatu organisasi seperti Dinas Pendidikan kota Pekanbaru bukan suatu benda, atau suatu tujuan, atau suatu karakteristik dari output atau perilaku organisasi, tetapi cukup suatu pernyataan dari relasi-relasi di dalam dan diantara jumlah yang relevan dari organisasi tersebut. Tetapi suatu organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan di Kota Pekanbaru untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasar kewenangan yang diperoleh. Sebagai organisasi pemerintahan memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai secara efektif. Efektivitas artinya bahwa tujuan organisasi itu sedang, atau telah tercapai efektivitas merupakan suatu yang hendak ditingkatkan oleh manajemen.

2. Kualitas Layanan

Program pendidikan dasar sembilan tahun di Kota Pekanbaru, merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan dan membekali anak didik dengan keterampilan dan pengetahuan dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk bekal menjalani kehidupan dalam masyarakat, untuk membuat pilihan pilihan dan memanfaatkan produk-produk berteknologi tinggi, untuk mengadakan interaksi dan kompetisi antar warga masyarakat, kelompok, dan antar bangsa.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi masyarakat maupun tuntutan pengguna layanan. Responsivitas juga bisa sebagai kerelaan untuk menolong

pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

Program wajib belajar pendidikan dasar di Kota Pekanbaru dilakukan baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Program jalur sekolah meliputi program 6 tahun di SD dan program 3 tahun di SMP. Pola-pola yang diterapkan di tingkat SD antara lain SD Reguler, SD Terpadu, Madrasah Ibtidaiyah, pondok pesantren, SDLB, dan Kelompok Belajar Paket A. Sedang pola-pola untuk tingkat SMP adalah SMP Reguler, SMP Terpadu, Madrasah Tsanawiyah, pondok pesantren, SMPLB, SLB, dan Kelompok Belajar paket B.

4. Responibilitas

Responsibilitas banyak digunakan dalam menilai kinerja organisasi publik. Responsibilitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk bisa melaksanakan penilaian terhadap apa yang menadi sikap, perilaku dan sepak terjang birokrasi publik, maka harus memiliki standar penilaian tersendiri yang sifatnya administratif atau teknis, bukan politis. Responibilitas berhubungan dengan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan segala kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan yang benar dengan standart profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan secara optimal.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat. Asumsinya

adalah bahwa para pejabat politik karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat.

Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periode.

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Dinas Pendidikan Pekanbaru dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun

a. Faktor internal antara lain sebagai berikut :

Faktor internal terdiri dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan.

- Yang dimaksud dengan kekuatan adalah seluruh potensi yang dimiliki serta dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

- Yang dimaksud dengan kelemahan adalah Pendataan dan pemetaan pendidik formal dan non formal belum optimal tersusun secara baik

b. Faktor eksternal antara lain sebagai berikut :

Faktor internal terdiri dari faktor peluang dan faktor tantangan.

- Yang dimaksud dengan peluang adalah Tersedianya perangkat dan sistem informasi yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan peningkatan mutu pendidik dan pendidikan

- Yang dimaksud dengan tantangan adalah Kualitas sarana-prasarana pendidikan yang masih kurang memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kinerja Dinas Pendidikan Kota pekanbaru dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, dapat dilihat dari kajian dari masing-masing indikator penelitian ini, yakni :

a. Efektivitas, bahwa pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun telah didukung secara luas oleh seluruh elemen pemerintah Kota Pekanbaru dan instansi terkait serta didukung oleh masyarakat karena masyarakat yang paling membutuhkan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun itu.

b. Kualitas layanan, bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berusaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang anggota keluarganya membutuhkan pembelajaran lanjut setelah putus sekolah dasar dan masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa kesediaan untuk mengikuti prosedur administrasi sebagai peserta wajib belajar sembilan tahun (Paket B dan seterusnya) secara memadai, ini dapat menciptakan asset yang merupakan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di Kota Pekanbaru.

c. Responsivitas, bahwa pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga telah memberi respon terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar warganya, terutama yang putus sekolah dasar dan memfasilitasi kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melalui program wajib belajar sembilan tahun.

d. Responsibilitas, bahwa Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan segala kegiatannya sesuai dengan prosedur atau SOP yang

telah ditetapkan, dan sesuai dengan prinsip peraturan pemerintah yang benar dan sesuai dengan standart profesional dan kompetensi pegawai pemerintah dengan mengarahkan Sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

e. Akuntabilitas, kewajiban Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang melaksanakan program wajib belajar 9 tahun untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun :

Pelaksanaan program wajib belajar sembilan Tahun di Kota Pekanbaru sudah dapat dikatakan berhasil, namun masih terdapat kendala-kendala yuridis dihadapi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, yaitu belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun.

B. SARAN

Perlu kebijakan yang bersinergik melalui upaya pengembangan kerja sama lintas sektoral dan lintas disiplin dalam memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan, dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan. baik bagi pribadi, keluarga masyarakat, dan bangsa.

Guna mendukung keberhasilan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan, jalinan kerjasama antara tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan orang tua dengan pemerintah, hendaknya juga terus ditingkatkan. Hal ini penting karena tugas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua siswa. Tanpa keterlibatan semua pihak, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa niscaya tidak berhasil dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

Dwiyanto, Agus. 2002. *Peilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Fisip UGM.

Jati, Sutopo Patria MM. 2000. *Dasar-dasar Organisasi*. Universitas Diponegoro Semarang

Ulbert, Silalahi. 2002. *Pemahaman Praktis Asas-asas Manajemen*. Bandung : Mandar Maju

Keban, Jeremias. T. 1995. *Indikator Kinerja Pemerintah daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Makalah, Seminar Sehari, Fisipol UGM, Yogyakarta.

Lawton, Richard E. 2007. *Managing Productivity in Organization, A Practical People Oriented Perspectiv*. New York. Mc. Graww Hill Inc

Marbun, B.N. 2002, *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

McDaniel. 2000. *Theory : Strain Under Load*. 2000 dalam <http://www.accel-team.com/motivation/index.html>.

Rahmadi, Anton. 2005. *Manajemen Organisasi*. Universitas Mulawarman.

Dokumentasi :
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar.